



# Policy Brief

Desember, 2020

## INDEKS RASA AMAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020

### Ringkasan Eksekutif

Salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan suatu wilayah adalah rasa aman. Menjadi sangat mustahil jika memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dengan mengesampingkan masalah keamanan. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan di bidang politik dan keamanan memerlukan sebuah instrumen yang dapat mengukur serta memberikan gambaran kondisi politik dan keamanan terkini. Hal ini sekaligus untuk memperkuat tradisi *evidence based policy making* yang saat ini sedang diusung pemerintah. Keberadaan sebuah instrumen yang *reliable* dengan demikian menjadi sangat penting dalam pemberian rekomendasi bagi perumusan intervensi kebijakan yang akan diambil pemerintah

Kajian ini melakukan pengukuran indeks toleransi berdasarkan indikator Indeks Keamanan Masyarakat Indonesia atau IKMI (Bappenas) sebagai instrumennya, dengan menggunakan metode survey yang didukung oleh data sekunder di OPD terkait. Hasil dari kajian ini menggambarkan bahwa Indeks Rasa Aman Kabupaten Sidoarjo mencapai angka 76,03 dan termasuk dalam kategori Tinggi. Capaian ini lebih tinggi dari tahun lalu, yakni 76,01. Kenaikan yang terjadi hanya 02 poin dan tidak bisa melaju lebih tinggi lagi, karena dalam masyarakat sedang ada pandemi covid 19 yang berdampak pada seluruh dimensi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### Pendahuluan

Pentingnya rasa aman bagi manusia dikemukakan oleh Abraham Maslow dalam sebuah teori yang dikenal dengan hierarki kebutuhan. Dalam hal ini tingkat kebutuhan manusia dibagi ke dalam lima tingkatan atau yang lebih familiar dengan sebutan piramida Maslow yaitu (i) kebutuhan fisiologis atau *physiological needs*; (ii) kebutuhan akan rasa aman atau *safety needs*; (iii) kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang atau *social needs*; (iv) kebutuhan akan penghargaan atau *esteem needs*; dan (v) kebutuhan akan aktualisasi diri atau *self actualization*.



# Policy Brief

Desember, 2020

Polri sebenarnya telah menyusun indikator kamtibmas, seperti jumlah tindak pidana (*crime tta*), angka tindak pidana (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya tindak pidana (*crime clock*). Hanya saja indikator-indikator tersebut belum mencakup peristiwa-peristiwa tindak pidana yang tidak dilaporkan/ tidak tertangkap. Mengingat budaya masyarakat Indonesia yang masih rendah dalam hal lapor-melapor, angka-angka ini diyakini masih jauh dari angka sesungguhnya. Sehubungan dengan itu, maka diperlukan alat ukur yang dapat mencerminkan situasi keamanan yang dirasakan masyarakat. Dinamika internasional telah mendorong bagi perluasan pemaknaan keamanan bukan hanya terfokus kepada keamanan negara namun mencakup keamanan manusia. Keamanan manusia mencakup beberapa gagasan besar dengan aspek yang sangat luas dan dimaknai secara berbeda baik secara konseptual maupun perhitungan. Hal ini kemudian menghasilkan inisiatif bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo untuk membentuk sebuah indeks mengenai keamanan manusia.

## METODOLOGI

Kajian Indeks Rasa Aman ini digunakan metode penelitian survey dengan jenis penelitian deskriptif. Sampel di ambil berdasarkan probability sampling dengan teknik simple random sampling. Data primer diperoleh melalui wawancara pada responden terpilih di lokasi kajian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi dari OPD terkait.

Populasi dalam kajian adalah masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 2.249.476 jiwa dan tersebar dalam 18 kecamatan (Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2020, BPS). Sedangkan penentuan jumlah sampel (responden) di tentukan dengan rumus SLoVin, dengan derajat kesalahan 5% maka jumlah sampel yang akan di ambil adalah 400 orang. Jumlah tersebut akan di sebar merata ke 18 kecamatan (masing-masing kurang lebih 22 - 23 kuesioner).

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan analisa. Data kuesioner menggunakan skala likert, untuk kemudian di beri skor dalam proses penghitungan indeks rasa aman, dengan ketentuan sebagai berikut

Nilai Indeks Rasa Aman (IRA)	Keterangan
$0 \leq IRA \leq 20$	Rasa Aman Sangat Rendah
$20 < IRA \leq 40$	Rasa Aman Rendah
$40 < IRA \leq 60$	Rasa Aman Sedang
$60 < IRA \leq 80$	Rasa Aman Tinggi
$80 < IRA \leq 100$	Rasa Aman Sangat Tinggi



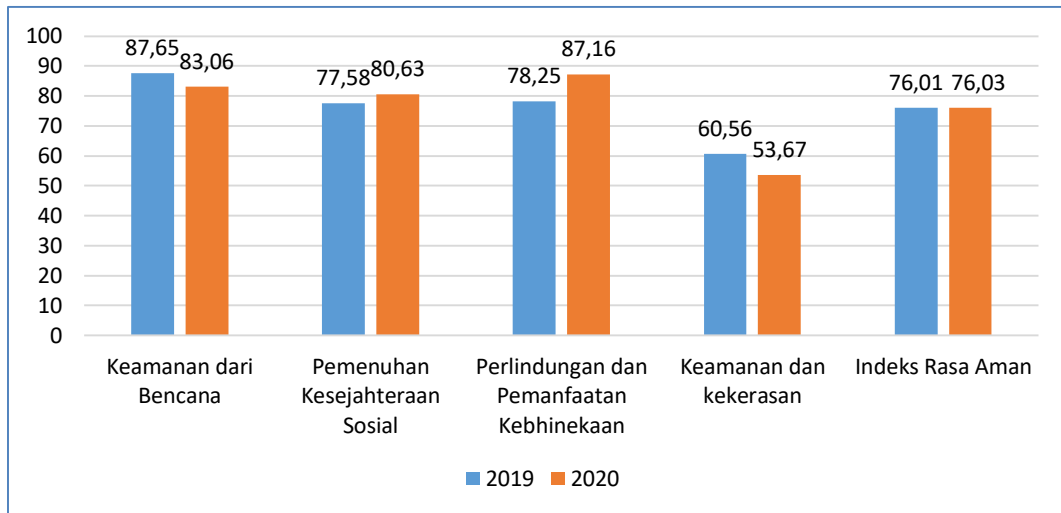
# Policy Brief

Desember, 2020

## Hasil Kajian

### I. Pengukuran Indeks Rasa Aman

Pencapaian indeks rasa aman mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari 76,01 di tahun 2019 menjadi 76,03. Perbandingan capaian masing-masing dimensi untuk tahun 2020 dan 2019, bisa di lihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Data Lapangan, diolah

Gambar 5.8.  
Perbandingan Capaian Indeks Rasa Aman Kabupaten Sidoarjo  
Tahun 2019-2020

Dari penghitungan tersebut, di peroleh nilai indeks rasa aman sebesar 76,03. Hal ini berarti angka rasa aman di Kabupaten Sidoarjo tergolong kategori tinggi. Temuan tentang rasa aman yang ditunjukkan dari hasil survei ini menunjukkan capaian angka tertinggi ada pada dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan Kebhinekaan Tentu saja temuan ini semakin menegaskan tingkat toleransi di Kabupaten Sidoarjo yang sangat tinggi. Perlu di garis bawahi aspek kebhinnekaan/keragaman adalah karakter dasar masyarakat Indonesia yang menjadi dasar eksistensi negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28 E ayat1-3 dan Pasal 28 I (ayat 1 - 2) juga telah ditegaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas kebebasan untuk menganut suatu agama, menyatakan pemikirannya, menentukan sikap politik serta berhak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun. Maka dengan capaian indeks dimensi ini yang 87,16 dan termasuk kategori tinggi cukup signifikan dengan ketentuan yang sudah di atur dlam Undnag Undang. Keberagaman suku, keberagaman karater dari para urban yang ada di Sidoarjo pada tahun 2020, justru menimbulkan kondisi yang kondusif dan sangat minim konflik.



# Policy Brief

Desember, 2020

Tertinggi kedua adalah dimensi Keamanan dari Bencana yakni 83,06. Angka ini meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tapi masih tetap dalam kategori tinggi. Hal ini berarti masyarakat Kabupaten Sidoarjo merasa bahwa pemerintah kabupaten telah melakukan berbagai upaya rekatif ataupun antisipatif berkenaan dengan bencana.

Selanjutnya, untuk dimensi pemenuhan kesejahteraan sosial, capaiannya adalah 80,63 termasuk kategori tinggi. Dengan tambahan pemaparan data mengenai indeks ketahanan pangan, jenis dinding rumah untuk tempat tinggal layak dan prosentase tingkat pengangguran terbuka, masyarakat Kabupaten Sidoarjo sudah merasa terpenuhi kebutuhan fisik dan biologis serta kebutuhan sosialnya untuk berkehidupan layak. Pencapaian indeks paling rendah dimiliki oleh Dimensi Keamanan dan kekerasan, yakni 53,27. Namun hal yang perlu diperhatikan untuk dimensi keamanan dan kekerasan fisik adalah, pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang diajukan kepada responden adalah berkali-kali negatif. Jadi jawaban yang diharapkan untuk menggambarkan kondisi yang aman dari kekerasan adalah memang yang mengandung jawaban tidak setuju atau sangat tidak setuju. Jadi jika capaiannya rendah justru menggambarkan kondisi yang aman, sedangkan kalau capaian tinggi maka justru masyarakat merasa sangat was-was akan ancaman keamanan dan kekerasan fisik dalam kehidupan sehari-hari.

## II. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Capaian Indeks Rasa Aman

### 1. Kesejahteraan Sosial

Tabel 1  
Indikator Pemenuhan Aman Kebutuhan Biologis

Indikator	Capaian 2019
Rasio rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air bersih terhadap total rumah tangga di suatu daerah	Prosentase Kebutuhan Air Rata: a. Air Kemasan (4,29%) b. Leding (17,95%) Sumur Bor/Pompa (42,96%) c. Sumur/ Mata air terlindungi (35,19%) d. Sumber Mata Air Tidak terlindungi (0,63%) (Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020 )



# Policy Brief

Desember, 2020

Indikator	Capaian 2019
Kecukupan Pangan (menggunakan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan- BPS)	Pada tahun 2019, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo mencapai angka 82,05 dan menempati peringkat ke 66 dari 416 kabupaten se Indonesia. (Sumber: Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian)
Angka Harapan Hidup	Tahun 2019, Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo adalah 73,98. Hal ini berarti, bayi yang lahir pada tahun 2019 berkesempatan hidup sampe usia 73 tahun. (sumber: BPS)
Tempat Tinggal yang Layak	<p>a. rumah tangga yang menempati rumah dengan dinding permanen adalah sebanyak 99,20%.</p> <p>b. rumah tangga yang menempati rumah berlantai bukan tanah sebanyak 0,8 %.</p> <p>(Sumber; BPS)</p>

Tabel 2

## Indikator Pemenuhan Aman Kebutuhan Sosial dan Aktualisasi Diri

Indikator	Capaian 2019
Pendidikan (menggunakan indicator dari Indeks Pembangunan Manusia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harapan Lama Sekolah di definisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan di rasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada tahun 2019 Harapan Lama Sekolah untuk anak-anak Kabupaten Sidoarjo adalah 14, 91 ini berarti anak-anak Kabupaten Sidoarjo mempunyai kesempatan bersekolah hingga jenjang Perguruan Tinggi semester 2.</li> <li>• Sedangkan Rata –Rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Tahun 2019 di Kabupaten Sidoarjo , rata-rata lama pendidikan yang ditempuh adalah 10,25. Hal ini berarti rata-rata lamanya anak-anak bersekolah di Kabupaten Sidoarjo adalah hanya sampai Sekolah Menengah Atas kelas 1. (sumber :BPS)</li> </ul>
Lapangan Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pengangguran penduduk usia <math>\geq 15</math> tahun yang dalam periode 2013-2014 relatif rendah (di kisaran 4 persen), pada tahun 2015 mengalami lonjakan yang signifikan mencapai 6,3 persen. Pada tahun 2017-2019, pengangguran menurun, sebesar 4,97 persen; 4,73 persen dan 4,72 persen.</li> </ul>








# Policy Brief

Desember, 2020

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ini dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk (15 tahun ke atas) yang menginginkan pekerjaan, 95 orang diantaranya telah bekerja</li> </ul> <p>(Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020 )</p>
--	--

## 2. Ekonomi

Tabel 3  
Identifikasi Dampak Ekonomi Skala Domestik Akibat Covid

Sektor	Dampak	Naik/Turun
<b>Rumah Tangga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan hilang akibat PHK atau karena pembatasan pergerakan masyarakat</li> <li>- Mengurangi konsumsi dan kebutuhan yang tidak perlu termasuk barang <i>durable</i>.</li> <li>- Meningkatkan tabungan.</li> <li>- Sebagian tidak bisa bekerja terkena wabah covid-19</li> <li>- Menghadapi kenaikan harga karena kelancaran distribusi terganggu</li> </ul>	Konsumsi RT ( C ) 
<b>Perusahaan / UMKM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permintaan barang/jasa untuk ekspor dan domestik mengalami penurunan</li> <li>- Neraca keuangan perusahaan terganggu</li> <li>- Pemutusan hubungan kerja dan ancaman kebangkrutan</li> <li>- Gangguan <i>supply chain</i> bagi perusahaan/UMKM yang melakukan ekspor dan impor</li> </ul>	Konsumsi Pemerintah ( G ) 
<b>Investasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan negara mengalami penurunan sebagai dampak turunnya aktivitas ekonomi dan harga komoditas global</li> <li>- Belanja meningkat untuk memberikan bantuan stimulus pada masyarakat rentan dan dunia usaha</li> </ul>	Investasi ( I ) 
<b>Lembaga Keuangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Volatilitas di pasar keuangan</li> <li>- <i>Capital outflow</i> dan depresiasi Rupiah</li> <li>- Perbankan dan lembaga keuangan berpotensi mengalami permasalahan likuiditas dan <i>insolvency</i>, terutama bank-bank kecil</li> </ul>	Expor ( E ) 
<b>Rest Of The World</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas pariwisata dan pergerakan manusia di dalam dan antar wilayah turun</li> <li>- Aktivitas perdagangan dan investasi dunia turun</li> </ul>	Impor ( M ) 





# Policy Brief

Desember, 2020

Sektor	Dampak	Naik/Turun
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan <i>supply chain</i></li> <li>- Harga komoditas internasional turun</li> </ul>	

**Sumber: Paparan MPPN-Musrenbang Propinsi Jatim April 2020**

### 3. Peristiwa Politik

Potensi konflik dalam Pilkada 2020 kali ini juga dipersulit oleh situasi selama pandemi COVID-19 ini, yaitu resesi ekonomi, pro-kontra penyelenggaraan Pilkada Serentak, ketidakpuasan terkait hadirnya beberapa UU, gangguan keamanan, dan *money politics*. Faktor-faktor tersebut bisa memperburuk potensi konflik sosial yang sudah ada. Faktor-faktor penyulit ini ada yang bersifat alami dan mengalami habituasi, namun ada pula yang merupakan hasil rekayasa. Pada dasarnya PILKADA ataupun PILKADES keduanya sangat rentan berpotensi munculnya beraneka kasus baru yang tiba-tiba muncul. Prediksi beberapa potensi permasalahan yang mungkin terjadi di Pilkada 2020, berikut ini 10 catatan tersebut:

1. Jual beli pencalonan (*candiday buying*) antara kandidat dan partai politik.
2. Munculnya nama bermasalah (mantan narapidana atau tersanaska korupsi) dan calon dengan dinasti.
3. Munculnya calon tunggal (KPU pada 10 Januari 2018 mengumumkan terdapat 19 daerah dengan calon tunggal. Tiga dari empat kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada di Banten bahkan mempunyai calon tunggal).
4. Kampanye berbiaya tinggi akibat dinaikannya batasan sumbangan dana kampanye dan diizinkan calon memberikan barang seharga maksimal Rp 25 ribu kepada pemilih.
5. Pengumpulan model ilegal (jual beli izin usaha, jual beli jabatan, suap proyek) dan politisasi program pemerintah (dana hibah, bantuan sosial, dana desa dan anggaran rawan lainnya) untuk kampanye.
6. Politisasi birokrasi dan pejabat negara, mulai dari birokrat, guru hingga institusi TNI/Polri.
7. Politik uang (jual beli suara pemilih).
8. Manipulasi laporan dana kampanye
9. Suap kepada penyelenggara pemilu.
10. Korupsi untuk pengumpulan modal, jual beli perizinan, jual beli jabatan, hingga korupsi anggaran.



# Policy Brief

Desember, 2020

Kontestasi dalam perebutan kekuasaan di tingkat lokal yang didominasi oleh kasus-kasus konflik selama pelaksanaan pilkada secara langsung merupakan suatu fenomena yang antitesis dari cara-cara demokrasi dalam memilih seorang pemimpin. Demokrasi sesungguhnya menghendaki cara-cara nonkekerasan dalam menentukan seorang pemimpin karena prinsip demokrasi dalam suatu pemilihan apakah itu pemilu maupun pilkada adalah sejauh mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama prosesnya menggunakan cara-cara yang demokratis dan menghindari cara-cara pemaksaan bahkan kekerasan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak pandemi dan peristiwa politik berpengaruh secara signifikan terhadap capaian Indeks Rasa Aman, sehingga hanya naik 0,2 poin saja. Meskipun ada kenaikan, tapi tidak banyak, bisa jadi jika tidak ada pandemi, capaian indeks rasa aman, bisa lebih tinggi lagi. Mengingat trend di tahun 2018-2019.

Capaian indeks kabupaten Sidoarjo terus mengalami peningkatan dan melampaui target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.

## Rekomendasi

- a) Untuk mewujudkan rasa aman masyarakat memberdayakan 3 pilar; Babinsa, Lurah atau kepala desa serta yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat. Kenapa masyarakat harus dilibatkan, karena dalam pembinaan, masyarakat tidak lagi sebagai obyek tetapi sebagai subyek. Artinya masyarakat tidak lagi berdiam diri di rumah, tetapi harus bersama-sama dengan aparat desa atau kelurahan melakukan pengamanan secara swadaya.
- b) Berkaitan dengan covid sebagai bencana non alam, perhatian terhadap penanganan munculnya pandemi Covid-19, sebagai bencana non-alam masih terbatas. Mempertimbangkan bahwa dampak bencana non-alam bersifat multi-aspek, maka dibutuhkan strategi terpadu dalam pembangunan nasional dan daerah. Sementara itu, Penduduk perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan memiliki risiko bencana tinggi. Mitigasi bencana yang lemah berakibat kepada potensi *economic loss* yang besar, maka diperlukan suatu kebijakan, seperti:





# Policy Brief

Desember, 2020

- Memperkuat Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat melalui peningkatan pemahaman risiko bencana berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal kepada masyarakat & aparat (Desa Tangguh Bencana).
  - Meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana, terutama untuk ancaman bencana kesehatan seperti peningkatan kapasitas APD dan rumah sakit.
  - Menyusun Rencana Kontijensi, Rencana Operasi, dan strategi lainnya sebagai SOP penanganan bersama kejadian bencana di wilayah rawan terdampak seperti pusat-pusat investasi, industri, dan pariwisata maupun kawasan produksi pangan.
- c) Dibutuhkan kebijakan yang mampu mempercepat pemulihan ekonomi, seperti: Stimulus pemodal terutama bagi industri sektor pangan dan kebutuhan dasar serta kelompok UMKM, Optimalisasi belanja daerah terhadap produk lokal daerah, Bantuan untuk sektor non informal
- d) Untuk rasa aman akan pemenuhan kebutuhan sosial, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, di butuhkan kebijakan seperti : Belanja Bantuan Sosial Daerah, Menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, Validasi data penduduk miskin dan rentan miskin untuk berbagai skema bantuan, Pengawasan program Bantuan Sosial Pusat dan peningkatan cakupan melalui Bantuan Sosial Daerah

## Referensi

- 
- Agusta, Yudi. 2007. K-Means-Penerapan, Permasalahan, dan Metode Terkait. *Jurnal Sistem dan Informatika*. Vol 3: 47 – 60. Asteris Huliaras dan Nikolaos Tzifakis, "Contextual Approaches to Human Security", *International Journal*, 2007, Vol.62.No.3 page 557-575
- Garry Goertz dan Paul F. Diehl. Toward a theory of International Norms: Some Conceptual and Measurement Issues dalam *The Journal of Conflict Resolution*, Vol.36, No.4 (Dec.,1992).
- Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. *International Norms and Political*



# Policy Brief

Desember, 2020

Change dalam International Organization, Vol. 52, No.4, 1998.

Tobias Debiel dan Sascha Werthes (ed), Human Security on Foreign Policy Agendas, Changes, Concepts and Cases., INEF Report, Essen, University of Duisberg, 2006. hal.16

T.S Hataley dan Kim Richard Nossal, "The Limits of The Human Security Agenda : The Case of Canada"s Response to the Timor Crisis" , Global Change, Peace and Security, Vol 16, no. 1, February 2004, Carfax Publishing.

Tobias Debiel dan Sascha Werthes, op.cit., hal.10 135 Shahrbanou Tadjbaksh dan Anuradha M. Chenoy, Op.Cit. hal. 15 136 Tobias Debiel dan Sascha Werthes, loc cit. 137 Sharbanou Tadjbakhsh, Human Security: Concepts and Implications. Centre d"études et de recherches internationales, Sciences Po, 2005. Diakses dari [http://www.cerisciencespo.com/publica/etude/etude117\\_118.pdf](http://www.cerisciencespo.com/publica/etude/etude117_118.pdf) pada 10 Nopemeber 2020

Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Merupakan Fokus Pemerintah Pada Tahun 2021, Di akses dari <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/percepatan-pemulihan-ekonomi-pasca-pandemi-merupakan-fokus-pemerintah-pada-nopember-2020>

Biro Pusat Statistik, Survey Tentang Dampak Pandemi Covid 19, Desember 2020